

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam era reformasi saat ini, pengelolaan anggaran di berbagai daerah harus transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengatur wilayah mereka sendiri setelah pemerintah pusat beralih ke pemerintah daerah. Akibatnya, mengembangkan dan menyediakan layanan publik menjadi mudah bagi pemerintah daerah. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban adalah semua bagian dari pengelolaan anggaran ini.

Beberapa tuntutan penting dari gerakan reformasi termasuk meningkatkan kinerja pemerintah, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan menerapkan praktik pemerintahan yang baik dan bersih. Good governance mencakup nilai-nilai yang melindungi keinginan dan kehendak rakyat serta nilai-nilai yang dapat membantu rakyat mencapai keadilan sosial, kemandirian, dan pembangunan berkelanjutan. Pada masa sebelum reformasi, sentralisasi kekuasaan dan keuangan negara telah memberikan banyak pengalaman kepada masyarakat daerah tentang ketimpangan dalam pembagian hasil dan sumber daya alam antara daerah dan Jakarta. Ini menyebabkan kekacauan di wilayah tersebut, yang menuntut otonomi atau bahkan keluar dari

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari pemerintahan yang baik, kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah merupakan salah satu masalah penting yang menjadi penyebabnya.

Pengelolaan anggaran memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana yang dialokasikan untuk pemerintah daerah dalam APBD ini digunakan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja dan sasaran yang dicapai dapat dilihat dalam laporan keuangan. Kementerian keuangan mencatat adanya fenomena tidak sehat yang terjadi pada keuangan pemerintah daerah. Mayoritas daerah terlalu mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai operasional birokrasi. Di dalam struktur APBD terdapat banyak daerah yang bergantung pada transfer pemerintah pusat, bisa sampai 80%. Hal ini semakin memperburuk keadaan karena adanya pemekaran wilayah.

Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membantu memahami pentingnya tata kelola keuangan publik yang baik. APBD adalah alat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang melibatkan pembagian pendapatan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di satu pihak pemerintah daerah dituntut untuk mewujudkan good governance sementara di pihak lain sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk semua kegiatan terutama menyangkut teknologi informasi dan sumber daya manusia

belum memadai. Hal tersebut dapat dipahami mengingat pemenuhan segala kebutuhan minimal memerlukan biaya dan tenaga ahli tidak sedikit. Pemerintah daerah mempunyai dana yang terbatas, personalia yang mempunyai kemampuan juga terbatas.

Akuntabilitas dan transparansi adalah dua prinsip utama yang harus ada dalam pengelolaan APBD. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana publik yang mereka terima. Pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan bagaimana dan untuk apa dana APBD digunakan. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi terkait APBD kepada publik.<sup>1</sup> Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, serta proses pengambilan keputusan terkait APBD.

Transparansi memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan APBD, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam menentukan prioritas dan memastikan keadilan dalam alokasi dana publik. Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah mematuhi prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup> Salomi, J., *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon 2015*

tersebut. Ini melibatkan evaluasi kebijakan, prosedur, dan praktik pengelolaan APBD, termasuk perencanaan anggaran, pelaksanaan, pelaporan keuangan, dan audit.

Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengelolaan APBD, serta menyediakan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, serta mencegah penyalahgunaan keuangan publik. Hal ini juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi publik, dan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Permasalahan yang sering terjadi terhadap pengelolaan anggaran pada Desa yaitu tidak transparan dan akuntabelnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak ikut berpartisipasi secara langsung dalam mengambil kebijakan. Pada penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang ada nya dana desa dan hanya melihat dari hasil pembangunan tanpa mengetahui bagaimana proses perencanaan dan dana yang dibutuhkan. Seperti permasalahan yang terdapat pada kabupaten Bogor yaitu Masih kurangnya keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran. Serta, Masih kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan

APBD. Serta, kurangnya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan secara efektif.

Undang-undang yang mengatur tentang akuntabilitas sektor publik, telah mengalami perubahan mendasar dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, Mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada stakeholders. Namun upaya perbaikan mengenai penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Upaya reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD. Dimana penelitian-penelitian tersebut menganalisis akuntabilitas dan transparansi terhadap beberapa daerah. Dengan adanya penelitian diatas peneliti berusaha menguji tingkat akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, guna mengevaluasi sejauh mana penerapan kedua prinsip tersebut serta menemukan

solusi perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bogor. Serta, melakukan analisis transparansi terhadap pengelolaan anggaran pada Kabupaten Bogor.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**



1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas program atau kebijakan yang telah ada, serta merancang kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pengelolaan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, penelitian ini dapat membantu mengarahkan penelitian selanjutnya untuk lebih memfokuskan pada aspek-aspek yang belum terkaji dalam penelitian ini.
3. Diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan APBD terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bogor.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah daerah agar lebih memperhatikan lagi kinerjanya, sehingga tidak ada lagi kasus kasus penyelewengan dana daerah.
2. Diharapkan pemerintah daerah lebih jujur dan terbuka kepada publik mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, sebab itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I ini merupakan bagian yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian dan tujuan penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II ini merupakan bagian yang berisikan kajian pustaka atau hal-hal yang menjadi landasan teori pada penelitian ini. Serta terdapat penelitian terdahulu yang bisa dijadikan pedoman oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III ini merupakan bagian yang berisikan pemaparan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan bahan-bahan materi yang akan digunakan. Dengan cara menentukan waktu dan tempat penelitian, informan, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik pengolahan data.



## **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada Bab IV ini berisikan tentang gambaran menyeluruh mengenai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan hasil analisis mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2022.

## **BAB V PENUTUP**

Pada Bab V ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti guna meningkatkan hasil riset yang sudah dilakukan.

